

Judul : Kebutuhan 23 Juta ton: pupuk subsidi hanya dialokasikan 9 juta ton
Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kebutuhan 23 Juta Ton Pupuk Subsidi Hanya Dialokasikan 9 Juta Ton

ANGGOTA Komisi IV DPR Johan Rosihan menegaskan, pupuk bersubsidi merupakan jantung produktivitas pertanian nasional yang harus dijaga keberlangsungannya. Pengelolaan harus dilakukan dengan transparan dan tepat sasaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan petani kecil.

Menurut Johan, Indonesia tidak kekurangan pupuk karena kapasitas produksi nasional mencapai hampir 14 juta ton per tahun. Tapi masalahnya bukan pada jumlah, melainkan bagaimana distribusinya, akurasi, dan keadilannya di lapangan, agar semua petani bisa mendapatkan haknya secara merata.

"Pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton tahun 2025, tapi tetap harus kita kawal agar benar-benar sampai ke petani yang berhak," ujar Johan di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dia lalu menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan pupuk petani dan alokasi subsidi Pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Pertanian

(Kementan), kebutuhan pupuk nasional mencapai sekitar 23 juta ton, sedangkan alokasi subsidi hanya sekitar 9 juta ton.

Kondisi tersebut, sambung Johan, menuntut optimalisasi penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati, sehingga produktivitas tetap terjaga tanpa membebani petani. Para pemangku kepentingan perlu mengembangkan semangat kemandirian dan inovasi pertanian.

"Pupuk organik seperti Petroganik dan NPK Pelangi harus terus didorong penggunaannya. Ini bukan hanya soal subsidi, tapi keberlanjutan ekosistem pangan kita," jelas politisi PKS itu.

Selain itu, Johan Rosihan mengajak semua pihak, termasuk Pemda, penyuluh, kelompok tani, dan aparat pengawas untuk menjaga integritas dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Jangan ada lagi keluhan pupuk langka di musim tanam.

"Kita ingin memastikan setiap butir pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani yang berhak. Ini bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional," tegasnya.

Senada, anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya memperkuat sistem distribusi pupuk bersubsidi yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Paskanya, keberhasilan swasembada pangan nasional sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan penyaluran pupuk kepada petani di seluruh wilayah Indonesia.

Penguatan distribusi pupuk bersubsidi, lanjutnya, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto yang menekankan ketahanan pangan sebagai salah satu dari delapan program prioritas nasional. Untuk itu, tugas di lapangan adalah memastikan petani mendapatkan dukungan penuh. ■ PYB